BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan nasional adalah hal upaya yang dilakukan oleh semua komponen bangsa dalam rangka mencapai tujuan bernegara. Undang-Undang yang digunakan dalam perencanaan pembangunan yang digunakan sebagai landasan adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Pembangunan nasional harus dilakukan sebesar-besarnya untuk kepentingan masyarakat secara luas. Manfaat dari pelaksanaan pembangunan nasional harus benar-benar tersampaikan kepada seluruh rakyat, bukan hanya memusat kepada sebagian-sebagian saja manfaat pelaksanaan pembangunan itu.

Pembangunan merupakan upaya yang secara sadar dilaksanakan oleh suatu bangsa, Negara dan pemerintah dalam rangka pencapaian tujuan nasional melalui pertumbuhan dan perubahan secara terencana menuju masyarakat modern. Pembangunan yang dilaksanakan haruslah diusahakan dan direncanakan secara sadar artinya pemerintah baik pusat maupun daerah harus memperhatikan pembangunan pedesaan demi tercapainya tujuan pembangunan nasional (S.P. Siagian, 2005).

Menurut Prof. Simon Kuznets (dalam Jhingan, 2012) pertumbuhan ekonomi adalah kenaikan jangka panjang dalam kemampuan suatu negara untuk menyediakan semakin banyak jenis barang-barang ekonomi kepada penduduknya. Sedangkan menurut Tarigan (2005) pertumbuhan ekonomi adalah

pertambahan pendapatan masyarakat secara keseluruhan yang terjadi di wilayah tersebut, yaitu kenaikan seluruh nilai tambah (*added value*) yang terjadi. Pertumbuhan ekonomi dapat dilihat PDRB suatu daerah tersebut. Jika nilai PRDB tinggi dapat diasumsikan bahwa kondisi perekonomian suatu daerah tersebut sudah baik. Membandingkan nilai PDRB per kapita beberapa daerah akan memberikan gambaran tentang tingkat pertumbuhan ekonomi.

Menurut Arsyad (2010) pertumbuhan dan pemerataan adalah dua kutub strategi pembangunan yang terkadang saling mengabaikan. Pembangunan yang memfokuskan pada aspek pertumbuhan ekonomi cenderung akan mengorbankan aspek pemerataan, begitupun kebalikannya. Dengan tidak meratanya pembangunan memunculkan ketimpangan atau kesenjangan.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008, Pemerintah telah menetapkan kawasan strategis Provinsi Jawa Barat yaitu salah satunya Kawasan Bodebekpunjur merupakan salah satu Pembangunan Wilayah (WP) yang berada di Provinsi Jawa Barat. Kawasan Bodebekpunjur terdiri dari Kota Bogor, Kabupaten Bogor, Kota Bekasi, Kabupaten Bekasi, Kota Depok, serta kawasan puncak di Kabupaten Cianjur.

Gambar 1-1 menunjukkan bahwa PDRB perkapita pada tahun 2016-2020 mengalami fluktuasi baik di Kawasan Bodebekpunjur, Sukabumi, Ciayumajakuning, Bandung Raya, Priangan Timur-Pangandaran, dan Purwasuka. Dari beberapa kawasan strategis di Provinsi Jawa Barat yang memiliki tingkat PDRB tertinggi yaitu terdapat di Kawasan Bodebekpunjur. Hal tersebut menunjukkan bahwa pembangunan di Jawa Barat lebih berfokus pada Kawasan

Bodebekpunjur dibandingkan kawasan lain yang ada di Provinsi Jawa Barat, sehinnga mengakibatkan ketimpangan pembangunan di Kawasan Provinsi Jawa Barat.

Gambar 1-1
PDRB per Kapita Atas Dasar Harga Konstan Tahun Dasar 2010 di Kawasan Strategis Provinsi Jawa Barat Tahun 2016-2020 (Rupiah)

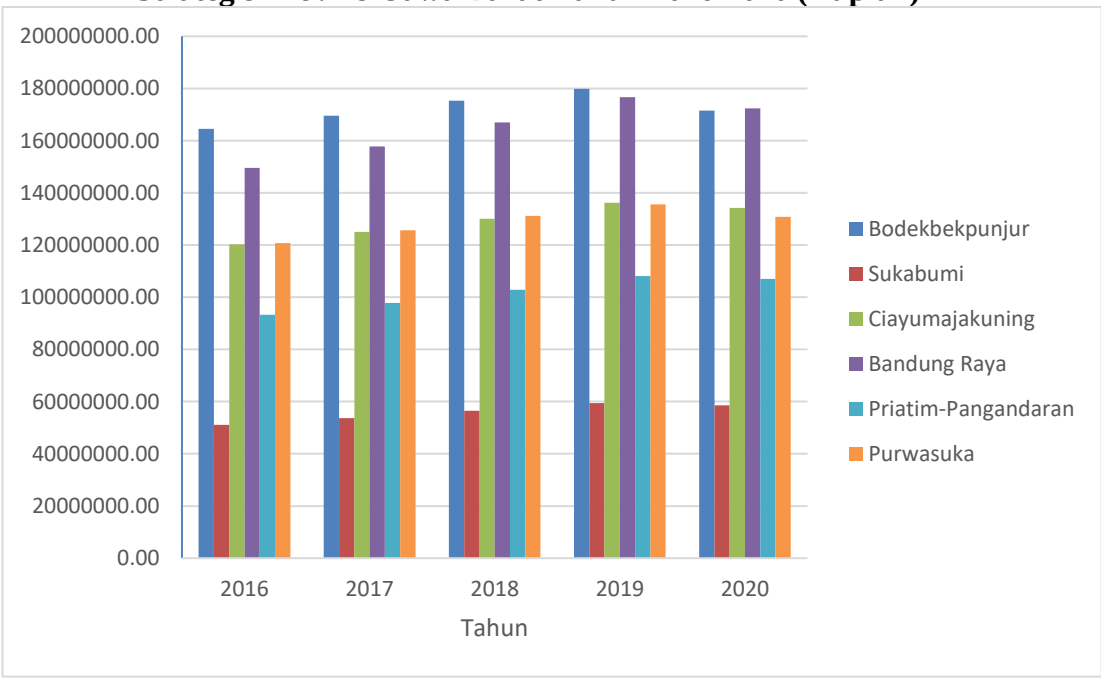

Sumber : BPS, 2021 (diolah)

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan pengukuran perbandingan dari harapan hidup, pendidikan, dan standar hidup untuk semua negara. IPM digunakan sebagai indikator untuk menilai aspek kualitas dari pembangunan dan untuk mengklasifikasikan apakah sebuah negara termasuk negara maju, negara berkembang, atau negara terbelakang dan juga untuk mengukur pengaruh dari kebijakan ekonomi terhadap kualitas hidup (BPS, 2016).

Tinggi rendahnya Indeks pembangunan manusia akan berdampak pada tingkat produktivitas penduduk, semakin rendah IPM maka tingkat produktivitas penduduk juga akan semakin rendah dan akan berpengaruh juga pada rendahnya

pendapatan begitu pun sebaliknya semakin tinggi IPM maka akan semakin tinggi pula tingkat produktivitas penduduk yang akan mendorong tingkat pendapatan menjadi lebih tinggi. Berikut ini merupakan tabel yang menunjukkan data perbandingan indeks pembangunan manusia di Kawasan Provinsi Jawa Barat.

Gambar 1-2
Indeks Pembangunan Manusia di Kawasan Strategis Provinsi Jawa Barat Tahun 2016-2020 (Indeks)

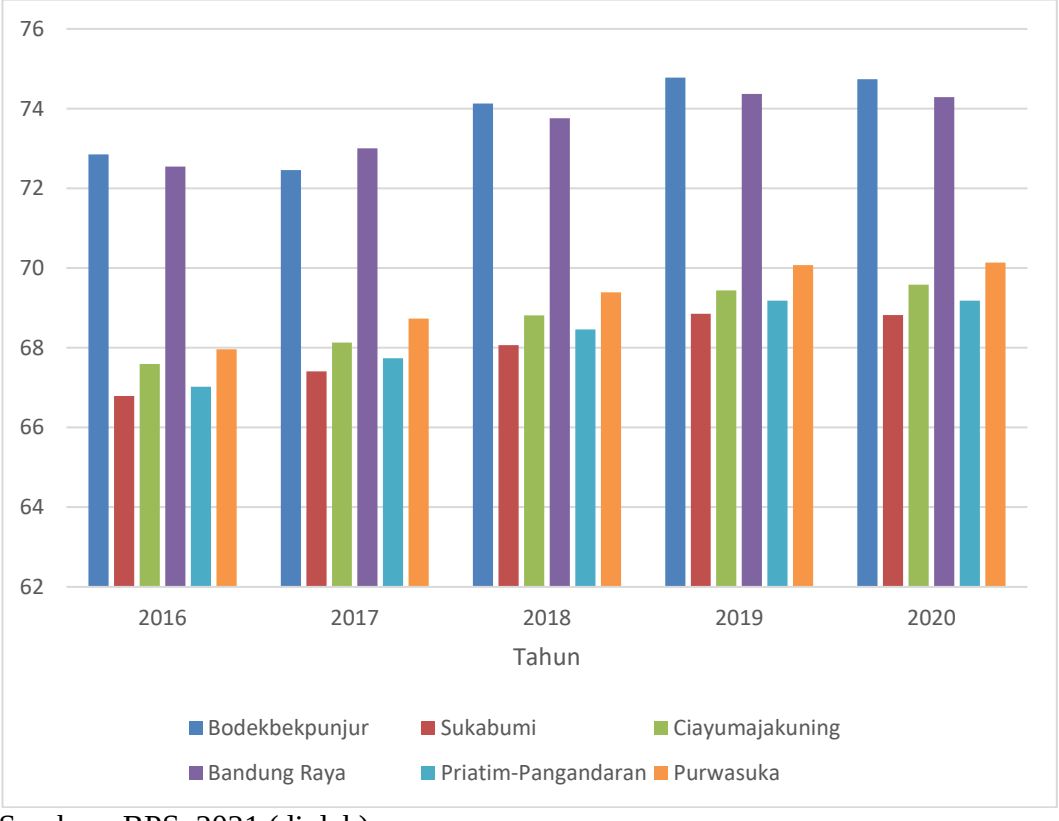

Sumber : BPS, 2021 (diolah)

Berdasarkan Gambar 1-2 tersebut, bahwa keadaan IPM di Kawasan Strategis Provinsi Jawa Barat mengalami peningkatan dari tahun 2016-2020. Pada Kawasan Bodebekpunjur memiliki angka IPM lebih tinggi dibandingkan dengan kawasan strategis lain yang ada di Provinsi Jawa Barat. Hal ini menunjukkan bahwa terjadi ketimpangan produktivitas yang terjadi antara kawasan tersebut.

Wilayah industri cenderung berlokasi di dalam kabupaten dan sekitar kota, karena wilayah industri beraglomerasi di wilayah yang memiliki potensi serta kemampuan daerah yang dapat memenuhi kebutuhan industri suatu wilayah. Pengelompokan kegiatan industri juga terjadi dikarenakan setiap kegiatan industri bisa mendapatkan manfaat dari kedekatan lokasi berbagai perusahaan industri (Kusumasari dan Kartiasih, 2017).

Provinsi Jawa Barat merupakan salah satu Provinsi di Indonesia dengan jumlah kawasan industri terbanyak, atau lebih dari 40 kawasan industri ada di wilayah ini yang tersebar di Kabupaten Bekasi, Kota Bekasi, Kabupaten Karawang, Kabupaten Purwakarta, Kabupaten Sumedang dan termasuk Kabupaten Subang.

Bodebekpunjur dipilih menjadi daerah yang diteliti karena merupakan bagian dari pinggiran Jakarta (*fringe region*) yang mempunyai perkembangan aktivitas industri yang sangat pesat, dilihat dari status wilayah perkotaan Bodebekpunjur yang termasuk dalam Wilayah Pengembangan I (WP I) yang difungsikan pengembangan industri, perdagangan dan jasa serta permukiman.

Berdasarkan pemaparan diatas, perlu dianalisis lebih jauh mengenai hal tersebut, maka penelitian ini diambil judul “Analisis Pengaruh Aglomerasi Industri, Indeks Pembangunan Manusia, dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Ketimpangan Pembangunan Di Kawasan Bodebekpunjur Tahun 2016-2020.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka dapat dirumuskan masalah pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh Aglomerasi Industri terhadap Ketimpangan Pembangunan di Kawasan Bodebekpunjur pada tahun 2016-2020?
2. Bagaimana pengaruh Indeks Pembangunan Manusia terhadap Ketimpangan Pembangunan di Kawasan Bodebekpunjur pada tahun 2016-2020?
3. Bagaimana pengaruh Pertumbuhan Ekonomi terhadap Ketimpangan Pembangunan di Kawasan Bodebekpunjur pada tahun 2016-2020?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka adapun tujuan dari penelitian ini, diantaranya:

1. Untuk mengetahui pengaruh Aglomerasi Industri terhadap Ketimpangan Pembangunan di Kawasan Bodebekpunjur pada tahun 2016-2020.
2. Untuk mengetahui pengaruh Indeks Pembangunan Manusia terhadap Ketimpangan Pembangunan di Kawasan Bodebekpunjur pada tahun 2016-2020.
3. Untuk mengetahui pengaruh Pertumbuhan Ekonomi terhadap Ketimpangan Pembangunan di Kawasan Bodebekpunjur pada tahun 2016-2020.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini, diantaranya sebagai berikut:

1. Sebagai bahan pertimbangan bagi pemerintah daerah dalam mengambil kebijakan pengelolaan potensi ekonomi daerah agar dapat mengurangi ketimpangan daerah.
2. Sebagai bahan informasi bagi peneliti lain yang ingin meneliti lebih lanjut dalam aspek yang sama maupun aspek yang berhubungan.

E. Metode Penelitian

E.1 Alat dan Model Penelitian

Untuk menganalisis pengaruh Aglomerasi Industri, Indeks Pembangunan Manusia, dan Pertumbuhan Ekonomi terhadap Ketimpangan Pembangunan di Kawasan Bodebekpunjur tahun 2016-2020, menggunakan analisis regresi linear berganda serta menggunakan data panel atau analisis data panel, dengan model ekonometrik sebagai berikut :

$$IW_{it} = \beta_0 + \beta_1 AG_{it} + \beta_2 IPM_{it} + \beta_3 GROWTH_{it} + \varepsilon_{it}$$

Dimana :

IW_{it} = Indeks Williamson (Indeks)
AG_{it} = Aglomerasi Industri (Indeks)
IPM_{it} = Indeks Pembangunan Manusia (Indeks)
$GROWTH_{it}$ = Pertumbuhan Ekonomi (%)
ε = *Error Term* (Faktor Kesalahan)
i = Provinsi Ke-I (Bodebekpunjur)
t = Tahun (2016-2020)
β_0 = Konstanta
$\beta_1 .. \beta_3$ = Koefisien Regresi Variabel Independen

E.2 Data dan Sumber Data

Data yang dipakai pada penelitian ini menggunakan data sekunder. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini berupa data panel, yaitu penggabungan dari data silang tempat (*cross section*) dan data deret waktu (*time*

series) pada Kawasan Bodebekpunjur tahun 2016-2020. Terdapat 4 variabel yang akan diteliti, yaitu variabel Aglomerasi Industri (AG), variabel Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan Pertumbuhan Ekonomi (*GROWTH*) sebagai variabel bebas, serta variabel Ketimpangan Pembangunan (IW) sebagai variabel terikat. Sumber data berasal dari Badan Pusat Statistik yang menyajikan data PDRB, jumlah penduduk, tenaga kerja, indeks pembangunan manusia di Kawasan Bodebekpunjur tahun 2016-2020.

F. Sistematika Pembahasan

Sistematika penulisan penelitian ini terbagi menjadi lima bab yang disusun sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini membahas tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini menjelaskan landasan teori tentang Aglomerasi Industri, Indeks Pembangunan Manusia, Pertumbuhan Ekonomi dan Ketimpangan Pembangunan, meringkas hasil-hasil penelitian terdahulu, dan pada akhir bab membahas hipotesis penelitian.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini menjelaskan mengenai alat dan model analisis beserta langkah-langkah estimasi dan uji hipotesisnya, jenis data dan sumber data yang terdiri dari pembahasan definisi operasional variabel dan hipotesis penelitian.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini hasil penelitian yang mencakup analisis deskriptif yang berisi perkembangan ketimpangan pembangunan di Kawasan Bodebekpunjur yang diwakili oleh variabel yang ada dalam model analisis, penyajian hasil estimasi model analisis, yang diikuti dengan pembahasan dan interpretasi kuantitatifnya. Penutup pada bab ini yaitu membahas interpretasi ekonomi.

BAB V PENUTUP

Bab ini memuat kesimpulan, dan interpretasi hasil estimasi model analisis dan ditutup dengan saran kebijakan. Saran yang berupa masukan yang dapat diberikan untuk peneliti selanjutnya.